

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN KULTURAL DI INDONESIA

ROLE OF SOCIAL WORKERS IN OVERCOMING CULTURAL POVERTY IN INDONESIA

Marcelino Vincentius Poluakan

Program Magister Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran
Email: marcelinopoluakan86@gmail.com

Nunung Nurwati

Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran
Email: nngnurwati@yahoo.co.id

Abstrak

Pekerjaan sosial sejak lahirnya memiliki kaitan yang erat dengan permasalahan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang semakin kompleks menuntut praktik pekerjaan sosial yang terus diperkaya dengan strategi penanganan kemiskinan yang efektif dan inovatif. Kemiskinan kultural sebagai salah satu bentuk kemiskinan memiliki akar pada budaya serta *mindset* masyarakat yang konsumtif, tidak mau bekerja keras, berpasrah, tidak merencanakan masa depan dan sebagainya. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana strategi yang bisa digunakan dalam mengatasi kemiskinan kultural serta bagaimana peran pekerja sosial ketika berhadapan dengan individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang memiliki faktor pembentuk kemiskinan kultural. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang membahas pandangan pekerjaan sosial terhadap kemiskinan kultural serta penanganannya terutama oleh profesi pekerja sosial. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa *Strength Perspective*, Nilai Komposit Kemajuan serta Nilai Dasar Kemajuan dapat menjadi strategi awal untuk merubah budaya dan *mindset* masyarakat miskin secara kultural. Implementasinya di lapangan adalah dengan memanfaatkan perangkat pekerja sosial yang telah ada untuk menanamkan nilai-nilai tersebut di masyarakat, misalnya tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Kata Kunci: Kemiskinan Kultural, *Pespektif Kekuatan* dan Nilai Kemajuan, Peran Pekerja Sosial

Abstract

Since its beginning, social work has a close relationship with poverty. Since the problem of poverty becomes more and more complex, social work practice must also continue to be equipped with more effective and innovative strategies. The culture of poverty has roots in culture and a community mindset that is consumptive, unwilling to work hard, easy to give up, have no plan for the future and so on. This article will examine what strategies can be used to overcome the culture of poverty and what the social worker can do when they work with family or community who have a culture of poverty. The method used is study of literatures discussed on how social work dealing with the culture of poverty and how they overcome it. The conclusion of the study is that the use of Strengths Perspective and Composite Progress Value and Basic Progress Value can be an initial strategy to culturally change the mindset of the poor. The implementation is by utilizing the existing resources to instill these values, for example the assistants of the Program Keluarga Harapan (PKH).

Keywords: *The Culture of Poverty, Strengths Perspective, The Role of a Social Worker*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi topik yang sering dibahas hingga saat ini. Dalam banyak penelitian ilmiah serta dalam editorial media massa, kemiskinan sering menjadi topik utama yang menjadi objek pembahasan. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan memiliki dimensi yang luas untuk dibahas serta penyelesaiannya yang membutuhkan keterlibatan lintas sektoral serta lintas perspektif.

Di Indonesia sendiri, kemiskinan telah ada sejak lama hingga saat ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia pada September 2019 berada di angka 9,22% atau jumlah penduduk miskin mencapai 24,79 juta orang (BPS, 2019). Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir. Namun, jumlah orang miskin tersebut masih dianggap besar sehingga dibutuhkan berbagai terobosan dalam menyelesaikan permasalahan.

Luasnya dimensi kemiskinan membuat upaya penyelesaiannya menjadi lebih kompleks. Dimensi tersebut antara lain ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya, politik, pendidikan, agama dan budi pekerti (Suryawati, 2005). Masing-masing dimensi tersebut membutuhkan penanganan secara khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Belum lagi penyebab kemiskinan yang bersifat struktural, kultural dan sebagainya.

Sejak dulu, Indonesia telah memiliki banyak program pengentasan kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan permasalahan lintas sektor, maka penyelesaiannya harus melibatkan lintas perspektif dan *stakeholder*, misalnya di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Berbagai program di atas diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dibutuhkan program yang berkesinambungan

dan terkoordinasi. Di samping itu, dibutuhkan peran dari semua *stakeholder*, baik pemerintah maupun non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, lembaga filantropi dan sebagainya. Selain pelaksanaan, dibutuhkan juga evaluasi yang terintegrasi agar semua kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Pekerjaan sosial yang memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan sosial memiliki perhatian yang besar terhadap kemiskinan. Bagi pekerjaan sosial, kemiskinan merupakan *major problem* karena sejarah lahirnya profesi pekerjaan sosial ini tidak dapat dilepaskan dari upaya mengatasi permasalahan kemiskinan, yang pada awalnya masih dalam bentuk kegiatan *charity* (Ishartono, 2017). Oleh karena keterkaitan tersebut, profesi dan praktik pekerjaan sosial khususnya di Indonesia perlu mengembangkan langkah-langkah yang kreatif dan inovatif dalam mengatasi kemiskinan.

Dari segi struktural, berbagai upaya penanganan kemiskinan telah dilaksanakan. Upaya dalam bentuk program-program tersebut umumnya satu arah karena datang dari pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat miskin. Untuk memaksimalkan program-program tersebut dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, dibutuhkan juga upaya masyarakat untuk sadar dan mau keluar dari situasi kemiskinan, terutama kelompok masyarakat lemah dan tidak berdaya. Di sinilah peluang bagi pekerjaan sosial dalam melakukan intervensi terhadap masyarakat yang mengalami kemiskinan kultural (Hatu, 2010).

Kemiskinan kultural serta faktor-faktor pembentuknya bukanlah persoalan yang mudah diselesaikan atau dianggap enteng. Kemiskinan kultural yang tidak teratasi dengan baik akan membuat kondisi masyarakat yang mengalaminya semakin terpuruk. Oleh karena itu, bagaimana peran pekerja sosial sebagai

stakeholder dalam mengatasi kemiskinan kultural? Bagaimana pekerjaan sosial memandang kemiskinan kultural serta langkah konkrit apa saja yang bisa menjadi terobosan awal mengatasi kemiskinan kultural?

Dari berbagai kajian tentang peran pekerjaan sosial dalam mengatasi kemiskinan, banyak yang telah membahas tentang upaya mengatasi hambatan struktural. Namun, kajian yang membahas tentang peran pekerjaan sosial dalam kaitannya dengan faktor kultural kemiskinan masih sedikit. Melalui tulisan ini, penulis akan menggali berbagai informasi tentang kemiskinan kultural, hubungannya dengan pekerjaan sosial serta bagaimana upaya konkrit yang bisa diambil oleh pekerja sosial dalam mengatasi kemiskinan kultural.

Metode pengkajian yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur berupa buku dan artikel yang relevan dan terpercaya tentang kemiskinan kultural serta dinamika pemahamannya, dan peran pekerjaan sosial

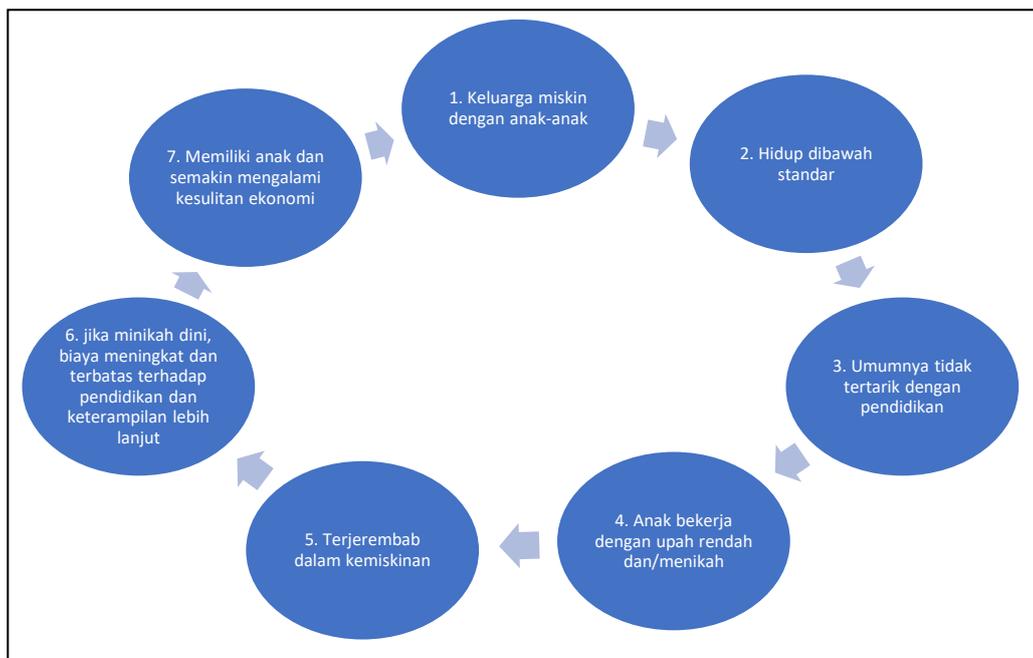
dalam kaitannya dengan kemiskinan. Penulis akan mulai dengan konsep kemiskinan secara luas dan konsep kemiskinan kultural secara khusus. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara pekerjaan sosial dan kemiskinan kultural. Dari kajian literatur tersebut, penulis akan menarik poin-poin yang berisi tentang upaya konkrit apa saja sebagai sumbangsih pekerjaan sosial bagi pengentasan kemiskinan kultural.

PEMBAHASAN

Kemiskinan Kultural

Secara umum, kemiskinan merupakan sebuah situasi dimana terjadi kekurangan sumber berupa uang atau barang dalam rangka menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2005:122). Kemiskinan mengindikasikan adanya ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang pada akhirnya membawa dampak ke berbagai permasalahan (Ishartono, 2016:162).

Gambar 1. Lingkaran Kemiskinan



Sumber: Zastrow, 2009

Penyebab kemiskinan sering dikelompokkan ke dalam beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor kultural. Faktor kultural membentuk kemiskinan kultural di suatu tempat. Dengan demikian, kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Selain itu, masyarakat menerima kondisi hidup sebagaimana adanya, penuh dengan kepasrahan, dan tidak memperlihatkan keinginan untuk keluar dari kondisi kemelaratan (Sangadji, 2015).

Oscar Lewis dan Edward Banfield (Rejekiingsih, 2011) mengatakan bahwa budaya kemiskinan merupakan gambaran budaya kelas bawah. Kelas ini berorientasi pada masa sekarang saja dan tidak ada penundaan atas kepuasan. Dengan demikian, kemiskinan seperti dikekalkan di kalangan mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini membentuk suatu lingkaran kemiskinan (Zastrow, 2009).

Kirby (2000) menyebut bahwa dalam konsep kemiskinan kultural, orang menjadi miskin karena sikap dan perilaku mereka sendiri atau bahkan dari orang tua mereka. Perilaku tersebut membuat mereka gagal untuk mengambil kesempatan sehingga mereka tetap menjadi miskin. Bahkan ketika kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor struktur dalam masyarakat, mereka gagal untuk terlibat dalam berbagai upaya untuk mengubah situasi tersebut. Hal ini lebih dikarenakan oleh budaya mereka dan bukan faktor-faktor struktural.

Kemiskinan kultural juga tidak terlepas dari budaya ketergantungan. Kirby (2000) melihat bahwa asal muasal dari budaya ketergantungan adalah negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan identik dengan

pemberian bantuan kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma dengan tidak melakukan apa-apa. Dengan demikian, masyarakat miskin tetap menganggur dan bergantung kepada pemerintah.

Di sisi lain, kemiskinan kultural juga terjadi di banyak negara berkembang dimana sistem kesejahteraannya belum maju atau komprehensif. Salah satu pencetusnya adalah faktor struktural. Contohnya, kemiskinan kultural di salah satu kawasan di Banyuwangi Selatan dimana masyarakat usia pendidikan tidak memiliki motivasi sekolah karena jarak tempuhnya yang jauh dan medan jalan sulit. Kondisi tersebut membuat orang tua urung menyuruh anaknya berangkat ke sekolah apalagi pada musim hujan (Hidayati, 2018:221).

Contoh lain adalah kemiskinan di Desa Pasir Lawang, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin di desa Pasirlawang tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya karena mereka hanya menunggu bantuan dari pihak lain. Padahal, bila masyarakat miskin tersebut memiliki gagasan dan kreativitas untuk memberdayakan lingkungan sekitarnya secara perlahan-lahan serta kerja keras yang tinggi, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya (Pajriah, 2018).

Hal demikian ditemukan juga dalam masyarakat Indramayu dimana kemiskinan mereka disebabkan oleh faktor konsumtif. Contohnya, masyarakatnya langsung membelanjakan uangnya sekaligus saat mendapatkan uang. Padahal kebutuhan pendidikan anaknya belum terpenuhi atau kesehatannya belum terjamin (Pikiran Rakyat, 2016).

Berdasarkan hasil kajian di atas, faktor penyebab kemiskinan kultural adalah adanya mental yang menganggap kemiskinan merupakan nasib, selain adanya faktor struktural tertentu. Orang menjadi malas untuk bekerja sehingga hidup dari memintaminta atau bekerja sambil apabila ada yang memerlukan. Budaya konsumtif juga membentuk kemiskinan kultural karena menyebabkan pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan (Hidayati, 2018). Selanjutnya, masyarakat tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya sehingga hanya menunggu bantuan dari pihak lain (Pajriah, 2018).

Upaya mengatasi kemiskinan kultural, selain menysasar kepada kemiskinan kultural juga harus menysasar pada faktor struktural yang mendorong terbentuknya kemiskinan kultural tersebut. Kemiskinan kultural memang tidak bisa dilepaskan dari faktor struktural misalnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta teknologi informasi yang sulit. Kesulitan tersebut lantas membuat masyarakat bersikap pasrah dan tidak mau berusaha dan berkreativitas untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sedangkan dalam rangka mengatasi faktor kemiskinan kultural tersebut, harus ada upaya khusus berupa pendekatan terhadap keluarga atau masyarakat. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengubah mental masyarakat menjadi lebih optimis dan mau berusaha secara kreatif. Selain itu, pendekatan terhadap mental tersebut diharapkan mengubah *mindset* yang konsumtif menjadi produktif serta belajar menabung untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik (Sukidjo, 2012).

Kemiskinan Kultural menurut Pekerjaan Sosial

Dalam konteks kemiskinan secara umum, pekerjaan sosial telah memiliki pandangan dan pemahaman yang komprehensif. Meminjam pengistilahan dari Krumer-Nevo (2015), pekerjaan sosial memandang kemiskinan dari tiga paradigma yaitu paradigma konservatif, paradigma struktural dan paradigma *poverty-aware*. Masing-masing paradigma adalah keseimbangan yang dinamis dimana setiap komponennya (ontologis, epistemologis dan aksiologis) saling mempengaruhi satu sama lain serta menjadi landasan bagi upaya dalam mengatasi kemiskinan tersebut (Krumer-Nevo, 2015).

Tabel 1. Tiga Paradigma Memahami Kemiskinan

	Paradigma Konservatif	Paradigma Struktural	Paradigma <i>Poverty-Aware</i>
Ontologi	Kemiskinan adalah budaya yang dimanifestasikan dalam karakteristik psikologis, kekeluargaan dan komunal orang miskin	Kemiskinan adalah konsekuensi dari tidak setaranya struktur dan institusi sosial	Kemiskinan adalah pelanggaran HAM. Orang miskin adalah agen yang melawan kemiskinan dalam kondisi kurangnya modal ekonomi dan simbolis
Epistemologi	Positivis, pengetahuan profesional sebagai tujuan kebenaran	Positivis, pengetahuan profesional sebagai tujuan kebenaran	Kritis-konstruktivis, diperoleh melalui hubungan dengan pengguna layanan

Aksiologi	Orang miskin menunjukkan penyimpangan yang serius dari norma sosial dan moral dan hidup dari produktivitas anggota masyarakat	Kemiskinan tidak kompatibel dengan masyarakat yang adil. Etika redistribusi	Etika solidaritas, minimalisasi perbedaan, memperluas kelompok 'kami'
Praktik	Pengawasan, pendidikan kembali	Pemberdayaan masyarakat, perubahan kebijakan	Relasi sebagai dasar untuk pengetahuan dan intervensi, berdiri bersama pengguna layanan, mengidentifikasi dan mengatasi agresif mikro, menggunakan privilege, mediasi dan advokasi aktif

Sumber: Krumer-Nevo, 2015

Kita telah membahas bahwa salah satu faktor penyebab kemiskinan kultural adalah faktor struktural. Struktur serta institusi sosial yang tidak adil dan memadai menyebabkan masyarakat miskin memiliki karakteristik-karakteristik budaya miskin seperti malas, tidak mau bekerja keras, tidak mau menabung dan seterusnya. Namun, bagi pekerjaan sosial, pembahasan kemiskinan kultural tidak berhenti pada paradigma konservatif dan struktural.

Bagi Krumer-Nevo, pekerjaan sosial harus melihat kemiskinan dengan suatu paradigma baru yaitu paradigma *poverty-aware*. Paradigma ini memungkinkan praktik pekerjaan sosial didasarkan pada analisis kritis dan menggunakan teori-teori kritis untuk menempa pertemuan interpersonal antara pekerja sosial dan penerima layanan sebagai sarana terwujudnya perubahan sosial. Keunikan paradigma ini terletak pada cara pekerjaan sosial mengintegrasikan aktivitas “melihat”, “memahami”, “mengalami sendiri” dan “bekerja bersama” dengan orang miskin. Keterkaitan ini sangat penting agar praktisi pekerjaan sosial menjadi lebih profesional dalam bidang kemiskinan dan keadilan sosial (Krumer-Nevo, 2015).

Selanjutnya, tidak banyak referensi maupun penelitian yang bisa ditemukan dimana pekerjaan sosial secara spesifik berhadapan dengan kemiskinan kultural. Oscar Lewis, seorang antropolog terkenal yang merancang teori kemiskinan kultural, menyebutkan bahwa kontribusi pekerja sosial khususnya dalam negara dengan populasi orang miskin yang besar adalah dengan meningkatkan taraf hidup mereka serta menggabungkan mereka ke masyarakat golongan menengah (Lewis, 1966). Namun, bagi Krumer-Nevo, pemahaman di atas barulah sebatas pemahaman yang konservatif tentang kemiskinan karena melihat kemiskinan sebagai akumulasi dari penyakit serta defisit dalam hal psikologis, moral, perilaku dan budaya dari orang miskin (Krumer-Nevo, 2015).

Dengan demikian, berdasarkan paradigma *poverty-aware* tersebut, perlu dikembangkan suatu visi misi yang baru bagi pekerjaan sosial dalam menghadapi kemiskinan kultural. Dalam rangka mengangkat taraf hidup masyarakat yang memiliki faktor kemiskinan kultural, diperlukan intervensi yang menyentuh mental dan mindset orang miskin untuk bisa keluar dari kemiskinan kultural mereka.

Strategi Mengatasi Kemiskinan Kultural

Dalam menyoasar faktor pembentuk kemiskinan kultural yaitu mental dan mindset, selain tentu juga oleh struktur sosial di masyarakat, beberapa strategi yang bisa menjadi alternatif pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Mengubah perspektif dalam memandang orang miskin dari Problems-Perspective ke Strengths-Perspective. Problems Perspective berfokus pada masalah-masalah atau kekurangan dan kebutuhan penyandang masalah. Sedangkan, Strengths-Perspective melihat bahwa orang miskin memiliki sumber daya dan kapasitas untuk mengembangkan kehidupan mereka.
2. Pemerintah memiliki berbagai kebijakan dan program dalam mengatasi kemiskinan. Contohnya, Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Dana Desa, dan sebagainya. Beberapa program tersebut telah dilengkapi dengan organisasi atau perangkat pendamping terutama saat penyalurannya ke masyarakat. Pemerintah harus memaksimalkan peran para pendamping tersebut agar dapat membantu masyarakat mengikis budaya miskin yang masih ada.
3. Pemerintah perlu menumbuhkan self-efficacy, self-reliance dan kemandirian melalui program empowerment, dalam diri masyarakat miskin (Markum, 2009). Berbagai program pemerintah di atas harus dilihat dengan cara berpikir yang baru yang memunculkan mindset untuk berupaya keluar dari situasi kemiskinan. Program-program tersebut harus dipahami

sebagai stimulan untuk selanjutnya berusaha keras menjadi lebih sejahtera sehingga tidak ada lagi mental “ketergantungan” terhadap program-program tersebut.

4. Indonesia merupakan bangsa besar dengan nilai-nilai luhur dalam kehidupannya. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Nilai Komposit Kemajuan

No.	Nilai Komposit Kemajuan	Nilai Komposit Keterbelakangan
1.	Produktif dan humanistik	Ekspluatatif dan intimidatif
2.	Keadilan dan berbudi pekerti tinggi	Imperialistik dan berbudi pekerti rendah
3.	Menjunjung tinggi solidaritas	Bercerai berai dan saling menyalahkan
4.	Mengutamakan keberlanjutan dan ketegaran diri yang tinggi	Mendahulukan hasil segera dan kerapuhan diri yang tinggi

Sumber: Prawoto, 2009

Tabel 3. Nilai-nilai Dasar Kemajuan

No	Nilai-nilai Dasar Kemajuan	Nilai-nilai Dasar Keterbelakangan
1.	Rasa malu dan harga diri	Rai gedheg dan rendah diri
2.	Kerja keras	Kerja lembek
3.	Rajin dan disiplin	Malas dan seenaknya
4.	Hidup hemat dan produktif	Boros dan konsumtif
5.	Gandrung inovasi	Resisten inovasi
6.	Menghargai prestasi	Askriptif/primordial
7.	Sistematik dan terorganisir	Acak dan <i>difuse</i>
8.	Empati tinggi	Antipati tinggi
9.	Rasional/impersonal	Emosional/personal
10.	Sabar dan bersyukur	Pemarah dan penuntut

11.	Amanah (<i>high trust</i>)	Tidak bisa dipercaya
12.	Visi jangka panjang	Visi jangka pendek

Sumber: Prawoto, 2009

Nilai-nilai luhur di atas dapat juga diimplementasikan dalam upaya mengatasi kemiskinan kultural. Melalui nilai-nilai luhur di atas, masyarakat dapat mengubah mental dan *mindset* mereka kepada kehidupan yang lebih maju dan berkembang.

Selanjutnya, kita juga perlu mengapresiasi masyarakat miskin karena pada dasarnya mereka memiliki semangat untuk terus berjuang melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Berbagai ketidakadilan tersebut bisa datang dari dalam diri mereka sendiri maupun dari kekuatan-kekuatan lain misalnya pemerintah (Soetrisno dalam Pudjianto, 2015).

Oleh karena itu, dalam berbagai program pengentasan kemiskinan harus terkandung upaya untuk mendorong dan membangkitkan semangat masyarakat miskin untuk berusaha keluar dari situasi kemiskinan. Daya dan kekuatan yang mereka miliki harus dipandang dengan *strengths-perspective* agar berbagai upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan maksimal.

Terakhir, pemerintah perlu memetakan bentuk dan karakter budaya kemiskinan dalam setiap kelompok masyarakat. Misalnya, kelompok masyarakat nelayan yang cenderung memiliki pandangan yang berorientasi pada kehidupan di akhirat nanti. Kehidupan keseharian di dunia biarlah berjalan apa adanya dan tidak perlu dipikirkan dengan berat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya *mindset* tersebut. Misalnya, faktor kelembagaan,

program yang tidak memihak nelayan kecil dan sebagainya (Tain, 2011; Setyorini, 2013; Natalia, 2014; Juliantono, 2016).

Identifikasi juga perlu dilakukan terhadap faktor budaya atau nilai-nilai lokal yang tidak kondusif bagi suatu kemajuan. Ada beberapa tata nilai yang misalnya dianut oleh rumah tangga nelayan sehingga menyulitkan mereka untuk maju dan berkembang (Tain, 2011).

Analisis di atas disebut sebagai pendekatan sosial dan budaya dalam rangka memahami konteks riil kemiskinan. Pendekatan ini untuk mencegah agar masalah kemiskinan di setiap tempat atau provinsi tidak dianggap sama sehingga solusi yang digunakan cenderung dipukul rata (Wibawa, 2019).

Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial sebagai *stakeholder* kemiskinan perlu mengembangkan perannya agar lebih maksimal dalam mengatasi kemiskinan kultural, contohnya:

1. Mengubah perspektif dalam memandang orang miskin dan permasalahan. Pekerja sosial juga perlu mengembangkan dan memperkuat *poverty aware*-nya. Individu, keluarga atau masyarakat dengan kemiskinan kultural sejatinya memiliki potensi untuk keluar dari mental dan budaya yang memiskinkan. Tinggal bagaimana pekerja sosial membantu menggali potensi tersebut lewat teknik atau pendekatan tertentu.
2. Banyak pekerja sosial yang terlibat langsung dalam program pengentasan kemiskinan dengan menjadi pendamping. Salah satu contohnya adalah pendamping PKH. Struktur pendamping PKH sendiri dipandang sudah cukup baik dimana di tingkat kabupaten ada Pekerja Sosial Supervisor dan di tingkat kecamatan ada

Pendamping dan Asisten Pendamping. Untuk memaksimalkan daya masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, peran pendamping PKH sangat diperlukan terutama lewat intervensi terhadap keluarga-keluarga atau kelompok masyarakat yang memiliki faktor-faktor kemiskinan kultural. Contohnya adalah mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa yang luhur sebagaimana dalam nilai dasar dan komposit kemajuan misalnya dalam forum-forum pengembangan masyarakat seperti *Family Development Session* (FDS). Tentu saja, sebelumnya seorang pekerja sosial pendamping PKH harus terlebih dahulu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang Nilai Komposit Kemajuan serta Nilai-nilai Dasar Kemajuan. Di sini, seorang pekerja sosial memainkan peran sebagai “*educator*” maupun “*enabler*”.

PENUTUP

Pekerjaan sosial memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan karena sejak lahirnya pekerjaan sosial tidak pernah terlepas dari upaya mengatasi kemiskinan (Ishartono, 2017). Hingga kini, dimana pekerjaan sosial telah berkembang menjadi sebuah profesi, perhatian terhadap permasalahan kemiskinan masih mendominasi profesi pekerjaan sosial. Di sisi lain, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi serta faktor-faktor pembentuk kemiskinan kultural masih sering dijumpai di banyak daerah di Indonesia.

Pekerjaan sosial serta pekerja sosial memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pengentasan kemiskinan kultural. Pekerjaan sosial sebagai suatu disiplin ilmu dan profesi tidak hanya memandang kemiskinan sebagai persoalan yang harus diatasi tapi juga memperhitungkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat

miskin. Pekerja sosial perlu mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan ketika berhadapan dengan situasi kemiskinan kultural.

Bagi profesi pekerjaan sosial, diperlukan terobosan baru untuk masuk dan mendalami lebih jauh faktor-faktor pembentuk kemiskinan kultural di masyarakat. Beberapa strategi yang dipaparkan di atas dapat menjadi bahan masukan bagi *stakeholder* kebijakan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan dapat berlangsung dua arah. Berbagai program dan bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta untuk masyarakat miskin dapat didukung dengan perubahan budaya dan *mindset* keluarga dan masyarakat miskin secara kultural. Dengan demikian, masyarakat miskin dapat semakin mandiri, berdaya, memiliki keberlangsungan hidup (*sustainability*), memiliki ketahanan, serta kekuatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Glicken, M. D. (2011). *Social Work in the 21st Century An Introduction to Social Welfare, Social Issues, and the Profession*. California: Sage Publications.
- Kirby, M., et.al. (2000). *Sociology in Perspective*. Oxford: Heinemann Educational Publishers.
- Mohan, B. (2011). *Development, Poverty of Culture, and Social Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Zastrow, C. (2009). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. California: Brooks/Cole.

Publikasi Ilmiah:

- Hatu, R.A. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam

- Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis). *Inovasi*, 7(4), 240-254.
- Hidayati, N. (2018). Potret Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya melalui Program Perlindungan Sosial di Kawasan Terpencil Banyuwangi Selatan. *Jurnal Darussalam*, 10(1), 212-231.
- Ishartono, & Raharjo, T.S. (2016). Perspektif Kekuatan dalam Pekerjaan Sosial. *Empati*, 5(1), 1-10.
- Ishartono, Rusyidi, B., & Raharjo, T. S. (2017). Potret Orang Miskin dari Perspektif Kekuatan. *Share*, 7(1), 46-53.
- Juliantono, F.J., & Munandar, Aris. (2016). Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12(2), 1857-1866.
- Krumer-Nevo, M. (2015). Poverty-Aware Social Work: A Paradigm for Social Work Practice with People in Poverty. *British Journal of Social Work*, 46(6), 1-16. doi:10.1093/bjsw/bcv118
- Lewis, O. (1966). The Culture of Poverty. *Scientific American*, 215(4), 19-25. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/2493107?seq=1#page_scan_tab_contents
- Markum, M. E. (2009). Pengentasan Kemiskinan dan Pendekatan Psikologi Sosial. *Psikobuana*, 1(1), 1-12. Retrieved from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8ZlGqRz15QAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pengentasan+Kemiskinan+dan+Pendekatan+Psikologi+Sosial&ots=EtgEAX_uoB&sig=-aGZXC7lroAWtoroAKsvuU_HG68&redir_esc=y#v=onepage&q=Pengentasan%20Kemiskinan%20dan%20Pendekatan%20Psikologi%20Sosial&f=false
- Natalia, M., & Alie, M.M. (2014). Kajian Kemiskinan Pesisir di Kota Semarang: Studi Kasus Kampung Nelayan Tambak Lorok. *Jurnal Teknik PWK*, 3(1), 50-59.
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.
- Pajriah, S., & Suryana, A. (2018). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 5(2), 83-88. doi: <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v5i2.1939>
- Pudjianto, B. & Syawie, M. (2015). Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. *Sosio Informa*, 1(3), 231-246.
- Rejekiingsih, T.W. (2011). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 28-44.
- Sangadji, S., Abadi, T., & Fauziah, L. (2015). Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo. *Mimbar*, 31(2), 495-506.
- Setyorini, H.B. (2013). Budaya Kemiskinan Nelayan di Mangunharjo Semarang. *Sabda*, 8, 7-17.
- Sukidjo. (2012). Peran Pendidikan Kewirausahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Economia*, 8(1). 33-41.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3), 121-129.
- Tain, A. (2011). Penyebab Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan di Wilayah Tangkap Lebih Jawa Timur. *Humanity*, 7(1), 01-10.

Koran Elektronik:

- Wibawa, S.W. (2019, August 22). Sikap Pasrah dan Nrimo, Tantangan Besar

Hapus Kemiskinan di Jawa. *Kompas*. Retrieved from <https://sains.kompas.com/read/2019/08/22/131242323/sikap-pasrah-dan-nrimo-tantangan-besar-hapus-kemiskinan-di-jawa?page=all>

Halim, H.B. (2016, November 11). Masyarakat Indramayu Miskin Karena Konsumtif. *Pikiran Rakyat*. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01267415/masyarakat-indramayu-miskin-karena-konsumtif-384546>

Sumber Lain:

BPS. (2020, January 15). Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia September 2019. No. 08/01/Th.XXIII.

